

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era reformasi kata perubahan menjadi kata yang sering disuarakan, baik untuk individu ataupun oleh anggota kelompok masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur birokrasi menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah ditengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi, selalu mengeluh dan kecewa terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanannya.

Paling tidak ada 385 jenis pelayanan publik yang disediakan aparatur pemerintah kepada masyarakat mulai dari urusan kelahiran sampai urusan kematian. Semua jenis pelayanan publik tersebut disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Salah satu yang menjadi point utama adalah pelayanan publik yang dinilai masih minim dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat desa, terutama pada daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah berkembang. Dalam pelayanan kesehatan Masyarakat, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan serta biaya yang relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Terdapat tiga unsur pokok dari pelayanan itu sendiri. Pertama, biaya harus relatif lebih rendah, kedua waktu yang diperlukan dan terakhir mutu pelayanan yang diberikan harus relatif baik.

Keterlibatan pemerintah dalam hal ini yakni sebagai penanggung jawab dibidang pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, yang merupakan tujuan nasional harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Dengan desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dan memperhatikan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah

harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan itu, aparatur pemerintah sebagai perencana dan pelaksana suatu model kebijakan pelayanan publik, diharapkan mampu memberikan suatu bentuk peningkatan pelayanan, khususnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa.

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi kebijakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu peningkatan manajemen pelayanan kepada masyarakat yang berbasis kemasyarakatan, memberikan jaminan kesehatan terpadu bagi masyarakat desa, dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga medis yang dinilai mampu memberikan segala bentuk tindakan yang sesuai kemampuan mereka, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mampu mendukung terciptanya suatu pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan Kabupaten Jember merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dan pembangunan Nasional. Perlu diakui bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan selama ini masih meninggalkan akses-akses sampingan berupa keadaan lingkungan yang kurang stabil, perencanaan pembangunan yang kurang ditopang oleh analisa dampak lingkungan serta tindak lanjut implementasi yang kurang cermat sehingga dikhawatirkan kesemuanya itu menjadi pokok permasalahan yang dapat mengganggu kualitas lingkungan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada pelanggan, kebutuhan, serta harapan. Faktanya, dalam buku catalog data kesehatan menyebutkan bahwa Kabupaten Jember sesuai pendataan yang dilakukan pada tiap-tiap puskesmas menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) tinggi dari ibu melahirkan, terdapat 5 persen kematian ibu dari 100 orang ibu yang melahirkan. Angka kematian ibu disebabkan oleh pendarahan, infeksi dan partus lama. Sedangkan angka kematian bayi (AKB) dapat dikatakan 3 bayi dari 1000 kelahiran hidup telah meninggal sebelum usia genap 1 bulan.

Permasalahan diatas dikategorikan sebagai salah satu permasalahan yang rentan terjadi dalam proses pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Ini

membuktikan bahwa kurang efektifnya pelayanan yang diberikan dan kebijakan dari pemerintah daerah yang dianggap kurang berpengaruh terhadap proses pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Maka dari itu, dalam tujuan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Jember dan dibantu oleh pemerintah kecamatan setempat serta pihak-pihak terkait dan masyarakat yang ikut berpartisipasi berswasembada dibidang kesehatan ,diharapkan mampu dalam pencapaian pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa di Kecamatan Balung Pencapaian tujuan tersebut harus disertai dengan keinginan pemerintah daerah Jember untuk membangun tingkat pelayanan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat desa di Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan memperhatikan masalah yang sangat berpengaruh dalam proses peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa yaitu memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, dan menyediakan Sumber Daya Manusia(SDM) khususnya tenaga medis yang dinilai mampu untuk bekerja dengan baik, serta sarana dan prasarana sebagai aspek pendukung tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat desa yang baik dan profesional

Dengan bertitik tolak pada penjelasan diatas, maka dari penulis menganggap bahwa hal tersebut merupakan bahan yang cukup menarik untuk dianggap menjadi bahan penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Balung ”.

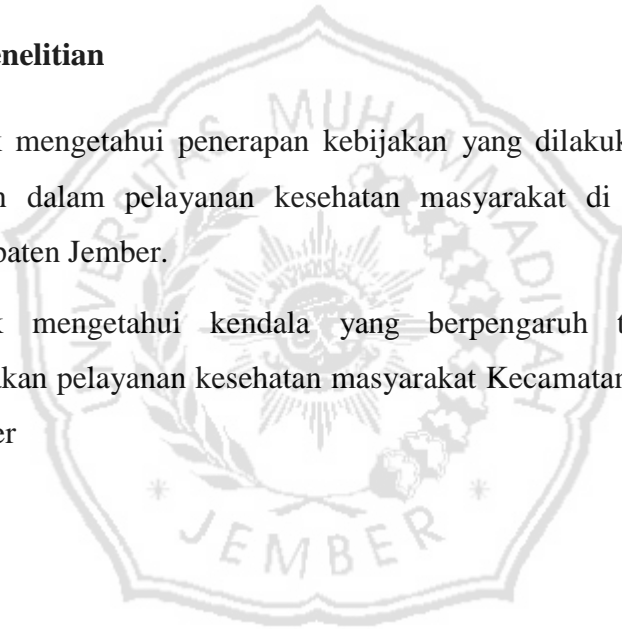
## **B. Rumusan Masalah**

Dengan Bertitik tolak pada Latar Belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi dan penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

## **C.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui kendala yang berpengaruh terhadap penerapan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat Kecamatan Balung, Kabupaten Jember



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan operasional pembangunan pelayanan disektor kesehatan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan guna penyusunan dan penyempurnaanpembangunan pelayanan disektor kesehatan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pedoman untuk peneliti selanjutnya

